

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017

Damar Daru Sukmaji, Abdul Rohman¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of Local Own Revenue, iscal balance transfers from the central government to regions and Regional Financial Effectiveness Level towards on the capital expenditure at the regencies/municipalities in Central Java Province. The sample used in this study were 35 regencies/municipalities in Central Java Province in 2015-2017. Sampling is done using the purposive sampling method. The test results show that the Local Own Revenue, General Allocation Fund, special allocation fund, Revenue Sharing Fund have a positive and significant effect on capital expenditure while Regional Financial Effectiveness Level have a positive effect but does not have significant effect on capital expenditure. With this result it can be said that the higher the Local Own Revenue, the general allocation fund, the special allocation fund and the Revenue Sharing Fund, the higher the capital expenditure, the hasn't have significant effect of Regional Effectiveness and the capital expenditure it might be influenced by several other factors.

Keywords Local Own Revenue, Budget, Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah menurut undang undang nomer 23 th. 2014 merupakan penyelenggaraan urusan yang diselenggarakan pemerintah dari pemda dan DPRD melalui prinsip yang luas berdasarkan sistem serta prinsip NKRI yang berlandaskan dari asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUD negara republik Indonesia tahun 1945.

Kemandirian suatu daerah tercermin dengan bagaimana daerah tersebut bisa menjadi mandiri melalui pengelolaan keuangan yang terindikasi dari semakin kuatnya kapasitas keuangan di suatu daerah ataupun pendapatan asli daerah oleh karena itu suatu daerah tersebut tidak semestinya bergantung pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan provinsi yang disalurkan dari dana perimbangan untuk pemerintahan daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari bagaiman pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah secara akurat dalam mengalokasikan dana tersebut menjadi belanja bagi suatu daerah. (Novianto & Hanafiah, 2015)

Dilihat dari hal-hal tersebut besarnya belanja modal dapat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta tingkat efektivitas keuangan daerah. Belanja modal digunakan dalam rencana pembangunan jangka menengah yang pemerintah pusat selalu memberi target rata-rata belanja modal kepada pemerintah daerah setiap tahunnya. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 pemerintah pusat memberikan target rata-rata belanja modal pemerintah daerah kisaran 26-30% dari total belanja daerah untuk meningkatkan dan memperbaiki pembangunan daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, belanja operasional Provinsi Jawa Tengah mencapai 78,6% dan belanja modal hanya sebesar 21% dari total belanja daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

¹ Corresponding author

Tengah masih berada di bawah target rata-rata nasional. Penyusunan belanja modal pada pemerintah daerah bisa dipengaruhi faktor keuangan maupun non keuangan. Namun pada penelitian ini terfokus pada faktor keuangan, antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) serta kinerja keuangan yang diproses dengan tingkat efektivitas keuangan daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Novianto dan Hanafiah pada tahun 2015. Perbedaan penelitian yaitu peneliti menggunakan daerah yang berbeda yaitu Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah periode penelitian 2015-2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan tingkat efektivitas keuangan daerah terhadap belanja modal.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bergman & Lane, (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris. Smith & Bertozzi, (1998) menyatakan bahwa dalam konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan dasar pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya. Pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik (Groenendijk, 1997).

Tuasikal, (2008) menyatakan bahwa belanja modal merupakan salah satu pengeluaran yang tercatat dalam penyelenggaraan keuangan negara serta tercantum di dalam keuangan suatu daerah yang telah disorot oleh publik. Oleh karena itu dalam hubungan dan masalah keagenan dalam penganggaran antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian tak terpisahkan dalam penelitian keuangan (termasuk akuntansi) publik, politik penganggaran, dan ekonomika publik. Eksekutif merupakan agen bagi legislatif dan publik (dual accountability) dan legislatif agen bagi publik. Dalam mengurangi asimetri informasi di mana pengeluaran yang dilakukan oleh eksekutif terlalu besar atau pendapatan yang diterima terlalu kecil dalam proses perencanaan anggaran (APBD) terkhusus belanja modal seperti, belanja modal tanah, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan diperlukan pengungkapan menggunakan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dalam hal ini DAU, DAK, DBH, serta tingkat efektivitas keuangan daerah memiliki peran yang efektif dalam peningkatan belanja modal yang lebih tinggi.

Pengaruh antara PAD terhadap Belanja Modal

Anggaran pendapatan dan belanja daerah seperti yang diatur di dalam PP nomor 58 Th. 2005 dasar penyusunannya harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah serta kemampuan pendapatan suatu daerah yang dihasilkan. Segala bentuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, alokasi belanja modal mestinya telah tersesuaikan berdasarkan kebutuhan suatu daerah yang mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang telah didapat. Bilamana pemda dalam meningkatkan belanja modal untuk keperluan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, pemda memiliki kewajiban dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar-besarnya. Riset yang dilakukan oleh Akbar, (2012) menunjukkan bahwa PAD memiliki dampak positif serta signifikan kepada alokasi belanja modal. Sianipar, (2011) juga menjelaskan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh yang signifikan kepada pengalokasian belanja modal. Hasil dari riset tersebut dapat terindikasi bahwa besaran dari pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor penentu di dalam menetapkan alokasi belanja modal. Peningkatan belanja modal yang tinggi disebabkan oleh besarnya penerimaan pendapatan asli di suatu daerah.

Berdasarkan landasan teori serta beberapa hasil riset di atas, maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: PAD memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh antara DAU terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengenai dana perimbangan menyatakan bahwa DAU memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan menggunakan penerapan formula yang telah dipertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, serta potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dengan luas suatu daerah, keadaan geografis daerah tersebut, jumlah penduduk di suatu daerah, serta tingkat kesehatan serta juga kesejahteraan masyarakat di daerah, lalu tingkatan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan kapasitas fiskal suatu daerah tercerminkan dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak, serta sumber daya alam.

Hasil penelitian Pradita, (2013) menyatakan bahwa dana alokasi umum memberikan dampak positif terhadap belanja modal. Akbar, (2012) juga menyatakan di dalam penelitiannya terdapat pengaruh positif serta signifikan antara dana alokasi umum kepada belanja modal. Begitupun dengan Sianipar, (2011) menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Dari hasil riset tersebut menunjukkan bahwa belanja modal yang tinggi sangat terpengaruh oleh sumber penerimaan dana alokasi umum. Sehingga semakin meningkatnya penerimaan dana alokasi umum semakin meningkat pula belanja modal. Berdasarkan landasan teori serta hasil riset sebelumnya, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: DAU memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh antara DAK terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan yang memiliki tujuan dalam membentuk keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus yang termasuk dalam komponen dana perimbangan yang merupakan dana yang bertujuan untuk membiayai kegiatan khusus yang telah menjadi urusan di daerah serta prioritas nasional, sejalan dengan fungsi yang telah diwujudkan dalam tugas pemerintahan di bidang tertentu, sejalan dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, yang terkhususnya di dalam pemaksimalan pemenuhan kebutuhan sarana serta prasarana pelayanan pokok bagi masyarakat. Pemanfaatan DAK yang diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. pemanfaatan dana alokasi khusus yang telah diarahkan dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Wandira, (2013) menjelaskan di dalam risetnya bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Menurut Sianipar (2011), juga menyatakan bahwa DAK mempengaruhi secara signifikan serta positif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan landasan teori serta hasil riset tersebut, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: DAK memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh antara DBH terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dan juga memperhatikan potensi daerah penghasil tersebut. Pemerintah daerah di dalam menetapkan belanja modal yang semakin besar jika pendanaan dana bagi hasil semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran dana bagi hasil semakin kecil. Wandira (2013), menuturkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teori serta hasil riset tersebut, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: DBH memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh antara Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal

Menurut Ardhini, (2011) menuturkan di dalam risetnya bahwa Efektivitas Keuangan Daerah tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap belanja modal disebabkan adanya indikasi apabila suatu keuangan daerah dapat dikatakan efektif maka timbul sebuah asumsi

daerah tersebut merealisasikan total anggaran belanja modal cukup tinggi khususnya demi kepentingan publik di daerah tersebut. Berdasarkan landasan teori serta hasil riset tersebut, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Tingkat efektivitas keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan objek yang memiliki nilai yang bakal digunakan di dalam riset untuk dipelajari hingga mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Variabel memiliki beberapa fungsi, di dalam riset ini variabel yang digunakan adalah variabel dependen serta variabel independen. Dapat dikatakan sebagai variabel dependen karena dipengaruhi oleh variabel independen. Di dalam riset ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen serta variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan belanja modal. Sedangkan variabel independen yang digunakan di dalam riset ini ada PAD, DAK, DBH, serta Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, DAK, DBH, dan tingkat efektivitas keuangan daerah. PAD dihitung dengan menambah total pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. DAU diukur dengan jumlah total celah fiskal dan alokasi dasar. DAK merupakan dana yang bersal dari APBN yang telah dialokasikan setiap tahunnya. DBH dihitung dari jumlah total DBH Pajak dan DBH sumber daya alam. Tingkat efektivitas keuangan daerah dapat dihitung dengan perbandingan realisasi PAD dengan PAD yang direncanakan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan nilai yang mungkin, hasil pengukuran maupun perhitungan, kualitatif mengenai karakteristik yang khusus dari seluruh anggota kumpulan yang lengkap serta jelas yang diinginkan untuk mempelajari sifat-sifatnya. Hasan, (2002) Dalam riset ini menggunakan populasi yaitu keseluruhan dari Pemkab serta Pemkot yang ada provinsi Jawa Tengah dari periode yang dipilih mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Menurut Hasan, (2002) sampel merupakan bagian dari sebuah populasi yang dianggap mampu mewakili populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh anggota populasi, alasan menggunakan seluruh anggota populasi dikarenakan sumber data berasal dari LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah diaudit oleh BPK RI Provinsi Jawa Tengah dan tidak ada LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015-2017 yang tidak diaudit oleh BPK Provinsi Jawa Tengah. Riset ini menggunakan data sekunder yaitu yang berupa laporan keuangan tahunan yang bersumber dari *website* www.djpk.depkeu.go.id.

Metode Analisis

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

a = konstanta

b₁, b₂, b₃ = koefisien regresi variabel independen

X₁ = PAD

X₂ = DAU

X₃ = DAK

X₄ = DBH

X₅ = Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya

e = kesalahan residual (*error*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperlihatkan persebaran data penelitian. Analisis ini memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Belanja Modal	105 51980727019.00	1275359088966.00	374014577140.5386	181825139174.06775
DAK	105 3750100000.00	483813446054.00	207745631157.2286	126637058863.30502
DAU	105 400176755000.00	1398539653000.00	940581516173.5426	245677687367.63254
DBH	105 18772034465.00	444863673539.00	68150135728.7905	66156741119.90126
PAD	105 152044596332.00	1791874833769.00	337099975844.7879	225982487920.82672
TEKD	105 97.17	126.60	108.5843	6.40431

Sumber: Data yang diolah (2019)

Hasil pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah observasi atau jumlah dari pengamatan pada Provinsi Jawa Tengah sebanyak 29 Kabupaten dan 6 Kota, data diambil dari LKPD pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS tampak bahwa rata-rata Belanja Modal memiliki nilai sebesar 374.014.577.140.5386 berarti sampel penelitian memiliki Belanja Modal yang cukup besar dimana nilai terendah Belanja Modal sebesar 5.198.0724.019,00, nilainya tertinggi sebesar 1.275.359.088.966,00.

Rata-rata Dana Alokasi Khusus (DAK) pada hasil olahan statistik deskriptif memiliki nilai sebesar 207.745.631.157,2286 hal ini menunjukkan bahwa sampel penelitian memiliki DAK yang cukup besar dikarenakan nilai terendah DAK sebesar 3.750.100.000,00 dan nilai tertinggi sebesar 483.813.446.054,00. Sedangkan nilai rata-rata DAK adalah 207.745.631.157,2286.

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai rata-rata sebesar 940.581.516.173.5426 dilihat dari rata-rata tersebut penelitian ini memiliki DAU yang cukup besar karena nilai terendah DAU sebesar 400.176.755.000,00 dan nilai tertinggi sebesar 1.398.539.653.000,00.

Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai rata-rata sebesar 68.150.135.728,7905 menunjukkan bahwa data penelitian ini cukup besar dikarenakan nilai terendah dari DBH sebesar 18.772.034.465,00 dan nilai tertinggi sebesar 444.863.673.539,00.

Rata-rata dari PAD sebesar 337.099.975.844,7879 hal ini menunjukkan bahwa sampel memiliki PAD yang cukup tinggi karena nilai terendah PAD sebesar 152.044.596.332,00 dan nilai tertinggi sebesar 1.791.874.833.769,00.

Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah yang ditunjukkan olah data deskriptif memiliki rata-rata sebesar 108,5843% menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian memiliki Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah yang cukup tinggi karena nilai terendahnya sebesar 97,17% dan nilai tertinggi sebesar 126,60%

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji model persamaan. Hasil pengujian model regresi disajikan sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	Nilai t	Signifikan
PAD (H1)	0,381	4,171	0,000
DAU (H2)	0,365	2,886	0,005
DAK (H3)	0,126	3,075	0,003
DBH (H4)	0,143	2,348	0,021
TEKD (H5)	0,000071	0,014	0,989
Adjusted R2	0,538		
F	25,233		
Sig. F	0,000		

Sumber: Data yang diolah (2019)

Hipotesis pertama menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Riset yang telah diujikan, memperoleh hasil koefisien regresi pada variable PAD sebesar 0.381 yang didapatkan dengan hasil Sig. sebesar 0.000 dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0.05 dan lebih besar dari 0.05. Jadi, pada uraian diatas menghasilkan bahwa hipotesis pertama menyatakan jika PAD berpengaruh secara positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan data analisis olah data kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2017, statistik deskriptif dari Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa nilai tertinggi dari Pendapatan Asli Daerah dimiliki Kota Semarang dengan nilai sebesar 1.791.874.833.769,00, jika dibandingkan dengan nilai terendah yaitu Kota Pekalongan dengan nilai 152.044.596.332, Kota Semarang memiliki nilai Belanja Modal sebesar 1.275.359.088.966 lebih besar daripada Kota Pekalongan yang hanya sebesar 157.668.840.341 yang menunjuka bahwa PAD berpengaruh positif dimana semakin besar PAD maka akan semakin besar Belanja Modal.

Hasil uji yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa hipotesis yang diajukan yaitu PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian dari Novianto & Hanafiah (2015) yang mendokumentasi hubungan positif antara PAD terhadap Belanja Modal.

Hal ini selaras dengan teori keagenan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima pemerintah makan akan semakin besar Belanja Modal yang akan diterima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat disarankan agar pemerintah semakin meningkatkan PAD untuk meningkatkan Belanja Modal.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Riset yang telah diujikan, memperoleh hasil koefisien regresi pada variable DAU sebesar 0,368 yang didapatkan dengan hasil Sig. sebesar 0.005 dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0.05 dan lebih besar dari 0.05. Jadi, pada uraian diatas menghasilkan bahwa hipotesis dua menyatakan jika belanja modal di terima karena mempengaruhi secara positif terhadap DAU.

Berdasarkan data analisis olah data kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2017, statistik deskriptif dari Dana Alokasi Umum menunjukkan bahwa nilai tertinggi dari Dana Alokasi Umum dimiliki Kabupaten Banyumas dengan nilai sebesar 1.398.539.653.000,00, jika dibandingkan dengan nilai terendah yaitu Kota Salatiga dengan nilai 400.176.755.000,00 Kabupaten Banyumas memiliki nilai Belanja Modal sebesar 400.832.864.576,00 lebih besar daripada Kota Salatiga yang hanya sebesar 107.149.176.492,00 yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dimana semakin besar DAU maka akan semakin besar Belanja Modal.

Berdasarkan penelitian dari (Novianto & Hanafiah, 2015) semakin meningkatnya Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum digunakan meningkatkan belanja modal di provinsi Jawa Tengah. Selain itu penelitian dari (Pradita, 2013) yang membuktikan secara empiris bahwa besarnya jumlah Belanja Modal dipengaruhi DAU.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dapat menunjukkan bahwa semakin tingginya dana transfer yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah akan semakin tinggi Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, hal ini menunjukkan kesesuaian dengan teori keagenan.

Hipotesis 3 (ketiga) yang menghasilkan data/sample bahwa DAK mempengaruhi positif dan signifikan (Sig.) terhadap Belanja Modal. Riset yang telah diujikan, memperoleh hasil koefisien regresi pada variable Dana Alokasi Khusus sebesar 0,126 yang didapatkan dengan hasil Sig. sebesar 0.003 di mana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0.05 dan lebih besar dari 0.05. maka pada uraian diatas menghasilkan bahwa hipotesis tiga menyatakan jika belanja modal diterima karena mempengaruhi secara positif terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan data analisis olah data kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2017, statistik deskriptif dari Dana Alokasi Khusus menunjukkan bahwa nilai tertinggi dari Dana Alokasi Khusus dimiliki Kabupaten Cilacap dengan nilai sebesar 483.813.446.054,00, jika dibandingkan dengan nilai terendah yaitu Kota Surakarta dengan nilai 3.750.100.000,00 Kabupaten Cilacap memiliki nilai Belanja Modal sebesar 843.986.253.460,00 lebih besar daripada Kota Surakarta yang hanya sebesar 235.829.590.702,00 yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dimana semakin besar Dana Alokasi Khusus maka akan semakin besar Belanja Modal.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novianto & Hanafiah, 2015) dimana semakin tinggi Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan Belanja Modal. Selain itu hasil uji empiris yang dilakukan oleh (Pealeu, 2013) juga menunjukkan kesesuaian bahwa DAK memiliki kontribusi besar terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Novianto & Hanafiah, 2015) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan Belanja Modal, hal ini menunjukkan sesuai dengan teori keagenan bahwa DAK yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota digunakan secara baik untuk Belanja Modal. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang berada di masyarakat dipertanggungjawabkan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.

Pengujian Hipotesis ke-empat digunakan untuk menguji pengaruh positif Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Riset yang telah diujikan, memperoleh hasil koefisien regresi pada variable dana bagi hasil sebesar 0,143 yang didapatkan dengan hasil Sig. sebesar 0.022 di mana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0.05 dan lebih besar dari 0.05. maka pada uraian diatas menghasilkan bahwa hipotesis tiga menyatakan jika belanja modal diterima karena mempengaruhi secara positif terhadap Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan data analisis olah data kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2017, statistik deskriptif dari Dana Bagi Hasil menunjukkan bahwa nilai tertinggi dari Dana Bagi Hasil dimiliki Kabupaten Magelang dengan nilai sebesar 444.863.673.539,00, jika dibandingkan dengan nilai terendah yaitu Kota Magelang dengan nilai 18.772.034.465,00 Kabupaten Magelang memiliki nilai Belanja Modal sebesar 233.070.956.632,00 lebih besar daripada Kota Magelang yang hanya sebesar 141.308.934.005,00 yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dimana semakin besar Dana Bagi Hasil maka akan semakin besar Belanja Modal.

Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novianto & Hanafiah, 2015) menunjukkan bahwa tingkat DBH yang diterima pemerintah kabupaten/kota mempengaruhi naik atau turunnya Belanja Modal, dari hasil penelitian tersebut penelitian ini telah sesuai. Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wulandari, 2014) yang menyatakan bahwa DBH semakin tinggi semakin meningkatkan Belanja Modal.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novianto & Hanafiah, 2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi DBH semakin tinggi Belanja Modal, hal ini sesuai dengan teori keagenan bahwa pemerintah kabupaten/kota menggunakan Dana Bagi Hasil untuk mendorong Belanja Modal untuk kegiatan pembangunan daerah bagi masyarakat.

Bedasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Riset yang telah diujikan, memperoleh hasil koefisien regresi pada variable tingkat efektivitas keuangan daerah sebesar 0,000071 yang didapatkan dengan hasil Sig. sebesar 0.989 di mana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0.05 dan lebih besar dari 0.05. maka pada uraian

diatas menghasilkan bahwa hipotesis lima bahwa hipotesis lima tingkat efektivitas keuangan daerah terhadap belanja modal tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan data analisis olah data kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2017, statistik deskriptif dari Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah menunjukkan bahwa nilai tertinggi dari Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah dimiliki Kabupaten Banjarnegara dengan nilai sebesar 126,60% jika dibandingkan dengan nilai terendah yaitu Kota Pekalongan dengan nilai 97,17% Kabupaten Banjarnegara memiliki nilai Belanja Modal sebesar 329.811.474.920,00 lebih besar daripada Kota Magelang yang hanya sebesar 220.686.788.384,00 yang menunjukkan bahwa Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah berpengaruh positif dimana semakin besar Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah maka akan semakin besar Belanja Modal. Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah pada periode 2015-2017 selalu mengalami penurunan sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil uji variabel Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Novianto & Hanafiah, 2015) yang menyatakan Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, serta TEKD sebagai proksi dari Belanja Modal. Melalui hasil yang ditunjukkan pada analisis regresi linear berganda hipotesis yang ada pada penelitian ini ada yang diterima dan ada yang tidak diterima mempengaruhi secara Signifikan. Sampel penelitian ini berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017. Sampel yang digunakan berjumlah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan tingkat efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan.

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Jumlah sampel yang digunakan hanya pada satu provinsi saja yaitu provinsi Jawa Tengah. Periode data yang diambil hanya 3 tahun.

REFERENSI

- Akbar, T. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2011). Universitas Pasundan. Bandung.
- Ardhini, (2011). Engaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah) (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). Public Policy In A Principal-Agent Framework. *Journal Of Theoretical Politics*, 2(3), 339-352.
- Groenendijk, N. (1997). A Principal-Agent Model Of Corruption. *Crime, Law And Social Change*, 27(3-4), 207-229.
- Hasan, M. I. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya.
- Novianto, R., & Hanafiah, R. (2015). Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi. *Jurnal Ekonomi*, 4(1), 1-22.

Pelealu, A. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1189–1197.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Pradita, R. R. (2013). Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur Rizanda Ratna Pradita.

Pradita, R. R. R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2).

Sianipar, E. S. (2011). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kab/Kota Di Sumatera Utara. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Smith, R. W., & Bertozzi, M. (1998). Principals And Agents: An Explanatory Model For Public Budgeting. *Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 10(3), 325-353.

Tuasikal, A. (2008). Pengaruh Dau , Dak , Pad , Dan Pdrb Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Indonesia Askam Tuasikal Universitas Pattimura Ambon Akam _ T @ Y Askam Tuasikal. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), 142–154.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wandira, A. G. (2013). Engaruh Pad, Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2.1.

Wulandari, Y. (2014). Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia.